



Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Pilar Keberhasilan Otonomi Daerah

Abdullah

Politeknik Siber Cerdika Internasional, Cirebon, Indonesia

Email: Abdullah@polteksci.ac.id

*Correspondence

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif merupakan faktor kunci dalam mewujudkan keberhasilan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, namun masih ditemukan berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti rendahnya kapasitas fiskal, ketidakefisienan alokasi anggaran, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa daerah otonom. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumen, serta observasi terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas perencanaan anggaran, serta mekanisme pengawasan. Beberapa daerah yang memiliki tata kelola keuangan yang baik mampu meningkatkan kemandirian fiskal serta pelayanan publik yang lebih optimal. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem pengawasan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebagai pilar utama keberhasilan otonomi daerah.

Kata kunci: pengelolaan keuangan daerah, efektivitas, otonomi daerah, kemandirian fiskal, tata kelola.

ABSTRACT

Effective regional financial management is a key factor in realizing the success of regional autonomy. Regional autonomy gives authority to local governments to manage financial resources independently, but there are still various challenges in its implementation, such as low fiscal capacity, inefficient budget allocation, and lack of transparency and accountability. This study aims to analyze the effectiveness of regional financial management in supporting sustainable regional autonomy. The method used is qualitative descriptive with a case study approach in several autonomous regions. Data were collected through in-depth interviews, document studies, and observations on regional financial management policies. The results of the study show that the effectiveness of regional financial management is greatly influenced by institutional capacity, the quality of budget planning, and the supervision mechanism. Some regions that have good financial governance are able to increase fiscal independence and more optimal public services. In conclusion, it is necessary to strengthen regulations, improve the competence of human resources, and optimize the supervision system to increase the effectiveness of regional financial management as the main pillar of the success of regional autonomy.

Keywords: regional financial management, effectiveness, regional autonomy, fiscal independence, governance.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, pengelolaan keuangan daerah menjadi isu krusial dalam administrasi negara, khususnya dalam mendukung otonomi daerah yang efektif. Di berbagai negara, praktik desentralisasi fiskal menjadi strategi utama dalam meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik. Menurut World Bank (2021), desentralisasi yang baik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Namun, dalam praktiknya, banyak negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam menerapkan sistem keuangan daerah yang efektif, terutama dalam hal kapasitas fiskal, tata kelola keuangan, serta pengawasan dan transparansi anggaran (Onofrei et al., 2022). Di Indonesia, konsep otonomi daerah yang telah diterapkan sejak reformasi 1998 masih mengalami berbagai kendala dalam hal implementasi kebijakan dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah mencakup regulasi yang belum optimal, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam administrasi keuangan, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah (Saad & Damayanti, 2020). Selain itu, ketimpangan fiskal antar-daerah juga menjadi permasalahan yang signifikan, di mana daerah dengan kapasitas fiskal rendah sering kali bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat (Samudro, 2024). Ketidakmerataan ini menghambat kemandirian daerah dalam mengelola keuangan mereka secara optimal, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas layanan publik yang disediakan.

Dampak dari faktor-faktor tersebut cukup kompleks. Regulasi yang kurang efektif menyebabkan ketidakefisienan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran daerah, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat pembangunan daerah (Yusuf et al., 2021). Sementara itu, rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan daerah menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja (Nugeraha et al., 2024). Di sisi lain, lemahnya pengawasan menyebabkan tingginya risiko penyalahgunaan anggaran, yang berujung pada meningkatnya kasus korupsi dalam administrasi keuangan daerah (Transparency International, 2023). Oleh karena itu, perlu adanya upaya reformasi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan efektivitasnya.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari administrasi negara yang bertujuan untuk menciptakan efektivitas dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah (Usman, 2023). Dalam konteks otonomi daerah, efektivitas pengelolaan keuangan tidak hanya berfokus pada perencanaan anggaran, tetapi juga pada aspek implementasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan fiskal daerah (Purba et al., 2023). Dengan demikian, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki tata kelola keuangan yang baik agar dapat mencapai kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam pendekatan analisis terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam administrasi negara. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek regulasi dan perencanaan anggaran, studi ini mengintegrasikan analisis dari berbagai faktor seperti tata kelola, akuntabilitas, serta dampak desentralisasi fiskal terhadap pembangunan daerah (Murniati, 2024). Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan kebijakan keuangan daerah yang lebih efektif.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mendukung keberhasilan otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya kebijakan desentralisasi, daerah memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengelola anggaran mereka. Namun, tanpa adanya sistem pengelolaan yang efektif, otonomi daerah justru dapat menjadi beban bagi

pemerintah pusat dan masyarakat (Harjowiryono et al., 2024). Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung administrasi negara yang transparan dan akuntabel. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah, mengkaji dampak pengelolaan keuangan terhadap pembangunan daerah, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi keuangan daerah (Marni et al., 2024).

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai administrasi negara dan pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam konteks negara berkembang. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan keuangan yang lebih efektif serta bagi akademisi dalam melakukan kajian lebih lanjut mengenai tata kelola keuangan daerah (Prayoga et al., 2025). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam administrasi negara. Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah, dampak desentralisasi fiskal terhadap pembangunan daerah, serta rekomendasi strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa daerah di Indonesia yang mewakili kategori daerah dengan kapasitas fiskal tinggi, sedang, dan rendah. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai variasi dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kondisi fiskal yang berbeda. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan, dimulai dari tahap perencanaan hingga penyusunan laporan hasil penelitian. Tahap pengumpulan data dilakukan selama tiga bulan, sementara tahap analisis dan penyusunan rekomendasi memakan waktu tiga bulan berikutnya.

Aspek yang Dikaji

Penelitian ini mencakup beberapa aspek utama dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk kebijakan fiskal, akuntabilitas pengelolaan anggaran, transparansi dalam administrasi keuangan, serta efektivitas sistem pengawasan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan desentralisasi fiskal, seperti kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari pemerintah daerah di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik purposive sampling, di mana daerah yang dipilih merupakan daerah dengan karakteristik fiskal yang beragam, mulai dari daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi hingga daerah yang masih bergantung pada dana transfer dari pusat. Responden utama dalam penelitian ini meliputi pejabat pemerintah daerah yang bertanggung

jawab dalam pengelolaan keuangan, auditor internal dan eksternal daerah, serta akademisi dan pakar di bidang tata kelola keuangan daerah.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi langsung. Wawancara dilakukan dengan pejabat pemerintah daerah, auditor, serta pakar kebijakan publik guna memperoleh informasi mengenai tantangan dan strategi pengelolaan keuangan daerah. Studi dokumentasi dilakukan dengan meneliti regulasi, laporan keuangan daerah, serta data sekunder lainnya yang relevan. Observasi langsung dilakukan untuk memahami implementasi pengelolaan anggaran serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan triangulasi metode untuk memastikan validitas dan reliabilitas data. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, sementara data sekunder diperoleh dari laporan keuangan daerah, peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu yang relevan. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara variabel yang diteliti.

Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan analisis tematik, di mana informasi yang terkumpul dikategorikan ke dalam tema-tema utama yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Analisis dilakukan secara induktif untuk mengidentifikasi pola yang muncul dari data yang dikumpulkan, serta secara deduktif untuk menguji temuan berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik validasi data dengan cara member-checking, di mana hasil analisis dikonfirmasi kembali kepada responden untuk memastikan akurasi interpretasi.

Etika Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan aspek etika penelitian, termasuk memperoleh izin dari instansi terkait, menjaga kerahasiaan data responden, serta memastikan bahwa partisipasi dalam penelitian ini bersifat sukarela. Seluruh data yang dikumpulkan akan digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik dan pengembangan kebijakan, tanpa merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Administrasi Negara

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keuangan daerah berfungsi sebagai sumber dana mandiri yang perencanaan, pengelolaan, dan penggunaannya berada dalam kewenangan pejabat daerah. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, regulasi yang kuat sangat diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kewenangan dan memastikan penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku (Zariyah et al., 2023) (Wuriasih et al., 2022).

Dasar hukum utama dalam evaluasi dan pengelolaan keuangan daerah mencakup:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur evaluasi rancangan peraturan daerah terkait APBD serta pertanggungjawaban pengelolaannya.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang menjelaskan prosedur evaluasi peraturan daerah terkait APBD serta perubahannya.

3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan ketentuan bahwa setiap pejabat dilarang mengeluarkan anggaran di luar APBD yang telah ditetapkan.
4. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, Pasal 23, yang mengatur perubahan APBD terkait kebijakan strategis, ketidaktercapaian target penerimaan, dan kebutuhan mendesak.

Dalam praktiknya, besarnya anggaran yang dikeluarkan daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan kepala daerah dan pejabat terkait. Hal ini dapat memicu potensi penyimpangan yang berujung pada kerugian keuangan daerah dan negara. Regulasi yang ketat diperlukan agar belanja daerah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menyimpang dari tujuan utama otonomi daerah, yaitu kesejahteraan masyarakat (Rumondor et al., 2023).

Selain itu, tanggung jawab kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai kurang efektif dalam mengontrol penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme sanksi yang lebih tegas, termasuk rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk menerbitkan peraturan presiden yang memungkinkan pemberhentian kepala daerah jika ditemukan penyimpangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Administrasi Negara

Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government). Dalam konteks ini, pemerintah daerah harus mengelola keuangan secara efisien, transparan, dan akuntabel guna mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Prinsip-prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah mencakup:

1. Asas Legalitas – setiap kebijakan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Asas Tidak Menyalahgunakan Kekuasaan – pejabat tidak boleh menggunakan kewenangan di luar kepentingan pemerintahan.
3. Asas Non-Diskriminatif – kebijakan keuangan harus berlaku adil bagi semua warga negara.
4. Asas Upaya Paksa – harus ada mekanisme sanksi bagi pelanggaran aturan keuangan daerah.
5. Adapun aspek-aspek utama dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP No. 58 Tahun 2005 mencakup penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban APBD, serta pengelolaan investasi dan aset daerah. Selain itu, pengelolaan anggaran daerah bertujuan untuk:
 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi anggaran yang tepat sasaran.
 2. Membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran melalui alokasi anggaran yang efektif.
 3. Meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

Menurut (Putri, 2023), anggaran memiliki fungsi sebagai pedoman pengelolaan keuangan, alat koordinasi antarunit pemerintahan, serta instrumen evaluasi kinerja organisasi. Dengan demikian, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah harus tetap mengacu pada transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan regulasi terkait lainnya.

Komparasi dengan Penelitian Sebelumnya

Dalam studi sebelumnya, pengelolaan keuangan daerah lebih banyak difokuskan pada aspek regulatif dan administrasi tanpa menyoroti dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat (Supit & Lumingkewas, 2023). Studi ini memperbarui pendekatan dengan menekankan pada transparansi kebijakan, akuntabilitas pejabat daerah, serta dampak pengelolaan anggaran terhadap kesejahteraan sosial. Temuan ini menguatkan perlunya sistem pengawasan yang lebih ketat serta kebijakan berbasis

kinerja untuk memastikan anggaran daerah benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya (Ulfah et al., 2024) menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan belum optimal akibat lemahnya mekanisme pengawasan dan rendahnya keterbukaan informasi. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan sistem audit keuangan, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan APBD, serta keterlibatan masyarakat dalam evaluasi anggaran dapat memperkuat efektivitas otonomi daerah.

Dengan adanya regulasi yang semakin diperbarui dan sistem evaluasi yang lebih ketat, pengelolaan keuangan daerah dapat lebih efektif dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, komparasi dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan berbasis teknologi dan partisipasi publik memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan regulasi yang telah diterapkan dalam administrasi keuangan daerah serta mengidentifikasi tantangan utama dalam penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi kebijakan keuangan daerah, termasuk kurangnya transparansi, lemahnya sistem pengawasan, dan adanya potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat daerah. Regulasi yang ada, meskipun telah dirancang untuk menciptakan efisiensi dan akuntabilitas, masih memerlukan perbaikan dalam mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya prinsip-prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini menyoroti perlunya inovasi dalam sistem pengawasan, seperti penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi anggaran daerah. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan data empiris dan analisis dampak jangka panjang dari regulasi yang diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan studi lebih lanjut yang menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan serta meneliti hubungan antara tata kelola keuangan daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus lebih diarahkan pada pengembangan sistem audit berbasis teknologi serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah dalam mengelola anggaran secara lebih profesional. Selain itu, perlu ada kajian lebih lanjut mengenai dampak kebijakan keuangan daerah terhadap sektor ekonomi lokal, termasuk aspek investasi dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harjowiryo, M., Widodo, R., Satrio, A. A., & Prasetyo, T. D. (2024). Successful Cooperation between the Ministry of Finance and Local Governments for Implementing Regional Financial Management: Key Factors. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 106–121.
- Marni, S., Permatasari, M., Sembiring, T. B., Kusnadi, I. H., Sari, A. R., Utama, A. S., Sawir, M., Sipayung, B., Suarlin, S., & Ari, E. A. (2024). *Hukum Administrasi Negara: Konsep dan Implementasi*.
- Murniati, S. (2024). The Role of Environmental Accounting in Improving Company Sustainability:(Empirical Study of Mining Companies in Indonesia). *Journal of Management*, 3(2), 341–358.
- Nugeraha, E. H., Adriani, A., & Hamdani, H. (2024). Analysis of the relationship between realization of local revenue (Pad) and realization of capital expenditure with realization of maintenance expenditure in regency/city governments in south kalimantan province in 2010-2016. *International Journal of Education, Information Technology, and Others*, 7(3), 148–157.
- Onofrei, M., Oprea, F., Iatu, C., Cojocariu, L., & Anton, S. G. (2022). Fiscal decentralization, good governance and regional development—empirical evidence in the European context. *Sustainability*, 14(12), 7093.
- Prayoga, R. A., Siregar, S., & Nasution, Y. S. J. (2025). Analysis of the Financial Statements of the Langkat Provincial Government Based on PP No. 8 of 2006. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 5(1), 71–79.
- Purba, S. F., Permatasari, C., Mudrawan, I., & Simandjorang, B. M. T. V. (2023). The Impact of Fiscal Balance Funds Toward Human Development in Riau Province. *Jurnal Bina Praja*, 15(2), 275–288.
- Putri, W. (2023). Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang Periode Tahun 2019-2022. *Jurnal Sustainability Riset Akuntansi*, 1(2), 126–138.
- Rumondor, M. D., Tinangon, J. J., & Wokas, H. R. N. (2023). Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Belanja Daerah Pada Bkad Provinsi Sulawesi Utara. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 14(1), 65–86.

Abdullah

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Pilar Keberhasilan Otonomi Daerah

Saad, M., & Damayanti, R. A. (2020). The Effects of Competence and Internal Control Systems on The Accountability of Village Financial Management with Organizing Commitmen as Mod-eration Variables. *GSJ*, 8(1).

Samudro, H. (2024). Regional Tax and Economic Growth in Indonesia. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 8(1), 113–126.

Supit, B. F., & Lumingkewas, E. M. C. (2023). *Pengantar Administrasi Keuangan Daerah*.

Ulfah, Y., Rahmawati, R., Arifin, Z., & Darma, D. C. (2024). Mengoptimalkan Bisnis Homestay melalui Pengelolaan Keuangan yang Inklusif—Lingkup POKDARWIS Desa Pela. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 648–658.

Usman, M. Y. (2023). Mitra Sanding Pelayanan Publik Bidang Transportasi Online (Studi Kasus Kebijakan Publik dalam Konteks Transportasi). *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2).

Wuriasih, A., Sirande, G. M., Werimon, S., & Malino, M. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari). *Lensa Ekonomi*, 16(01), 16–34.

Zariyah, S. A., Wijoyo, S., Salman, R., & Darwati, Y. (2023). Peningkatan Pelayanan PERUMDA Giri Tirta Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Di Kabupaten Gresik. *Janaloka*, 2(1), 78–98.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).